

## PUBLIKASI PERS

**JUDUL : PEMERINTAH BELUM SERIUS KENDALIKAN ROKOK**

**MEDIA : BERNAS JOGJA**

**TANGGAL : 8 JUNI 2016**

# Pemerintah Belum Serius Kendalikan Rokok

**DEPOK**--Jumlah perokok di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara upaya pengendalian tembakau dalam rangka membatasi konsumsi rokok belum berjalan secara optimal. Padahal konsumsi rokok secara jelas berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat

"Konsumsi rokok Indonesia terus naik, bahkan 36,3 % perokok aktif berasal dari kalangan remaja laki-laki. Tidak hanya itu 73,3 % pria diatas 15 tahun pun rentan terhadap rokok," tutur Dr. Nathalia C Tjandra, Senin (6/6) saat mengisi kuliah umum di Fakultas kedokteran UGM.

Dosen marketing The Business School, Edinburg Napier University, London ini mengatakan upaya kontrol rokok di Indonesia tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan.

Tidak seperti di sejumlah negara maju yang telah berhasil mengendalikan rokok secara efektif, Indonesia masih saja kesulitan mengontrol distribusi rokok di dalam negeri.

Misalnya saja Australia telah berhasil menjalankan kebijakan

kemasan rokok polos dalam pengendalian dampak konsumsi rokok.

Pemerintah Australia berhasil memaksa produsen rokok untuk menghilangkan seluruh bagian penting produk rokok seperti merek dagang, warna kemasan rokok, dan lainnya yang menjadi identitas sebuah produk rokok.

Sementara, kata dia, pemerintah Indonesia belum mampu menjalankan kebijakan serupa. Bahkan sampai saat ini Indonesia pun belum menandatangani dan meratifikasi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau (FCTC). Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia yang belum tergabung dalam keanggotaan FCTC.

Kenyataan bahwa industri rokok masih menjadi salah satu industri penghasil pendapatan terbesar negara masih menjadi pertimbangan untuk membatasi industri rokok ini.

Disamping itu industri ini mampu menyerap jutaan tenaga dalam rantai proses produksinya hingga pemasarannya. (\*)